KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945

Kedaulatan Rakyat EPAPER www.kr.co.id

BERLANGGANAN SCAN BARCODE

JUMAT PON | 3 MARET 2023 (10 RUWAH 1956 / TAHUN LXXVIII NO 153) | HARGA RP 4.000 / 20 HALAMAN

TANGGUL SUNGAI DI KUDUS JEBOL

Bengawan Solo Meluap, Sragen Banjir

SRAGEN (KR) - Sejumlah daerah di Jawa Tengah dilanda banjir, Kamis (2/3). Banjir antara lain terjadi di Sragen, Tegal, Kudus, Pati, dan beberapa daerah lainnya.

Sejumlah wilayah di Kabupaten Sragen terendam banjir akibat meluapnya air Sungai Bengawan Solo. Banjir terjadi sejak Rabu (1/3) malam. "Banjir di Sragen terjadi di Kecamatan Masaran, Plupuh, Sidoharjo Kota, Sukodono, Gesi, dan Tanon," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sragen Agus Cahyono.

Menurutnya, banjir terjadi sejak Rabu malam. "Kalau yang susulan baru. Ini masih ada penambahan debit, kondisi hujan juga di atas. Nanti siang infonya dari Perum Jasa Tirta (PJT) Waduk Gajahmungkur ada penambahan outflownya 288 meter kubik," katanya.

Agus Cahyono mengatakan, ketinggian air bervariasi, tergantung posisi bangunan. "Ada yang sampai 80 cm, itu wilayah sangat cekung. Kemarin ada laporan sampai 1 meter karena memang wilayahnya sangat cekung. Pertemuan Sungai Garuda dengan Bengawan Solo, itu tempuran (bertemu)," katanya.

Akibat banjir tersebut, pihaknya sempat mengkondisikan para murid-murid sekolah untuk dievakuasi ke rumah masing-masing. "Sementara sudah terkondisi. Memang ada sekolah yang diliburkan karena jalan masuknya terdampak, halamannya sudah tergenang. Dari koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) tadi ada

* **Bersambung hal 7 kol 1**

KR-Antara/Yusuf Nugroho

***BANJIR DI JALUR PANTURA:** Sejumlah kendaraan menerobos jalan yang tergenang banjir di Jalur Pantura, Desa Jati Wetan, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (2/3/2023). Banjir akibat curah hujan tinggi dengan ketinggian mencapai 30 centimeter itu menyebabkan kemacetan dari arah Kudus menuju Semarang.*

UNTUK PENANGANAN BENCANA

Pemda Agar Siapkan Dana Bersama

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo memerintahkan Pemerintah Daerah termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menganggarkan dana bersama terutama jika daerah tersebut rawan bencana.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di JI-Expo Kemayoran Jakarta, Kamis (2/3). "Yang paling penting lagi siapkan anggarannya, jangan sampai BPBD berteriak, 'Pak tidak ada anggarannya.' Atau ada yang menyampaikan anggarannya kecil sekali padahal jelas daerah itu sering terjadi bencana baik itu banjir, tanah longsor, gempa, erupsi gunung," kata Presiden.

Kepala Negara meminta agar Pemerintah Daerah dan BPBD dapat mengidentifikasi potensi bencana di daerahnya masing-masing, sehingga dapat memperhitungkan kebutuhan dana saat prabencana maupun pascabencana.

Menurut Presiden, setiap daerah sudah seharusnya menganggarkan dana mitigasi dan penanggulangan bencana apalagi risiko bencana alam meningkat, seiring dengan perubahan iklim yang saat ini ditakuti dunia. "Siapkan (anggaran). Jangan setiap bencana yang

* **Bersambung hal 7 kol 5**

KPU RI Bakal Ajukan Banding

Pengadilan Perintahkan Pemilu Ditunda

JAKARTA (KR) - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Dengan demikian, secara otomatis PN Jakarta Pusat pun memerintahkan untuk menunda pemilihan umum yang sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024.

"Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," ucap majelis hakim PN Jakarta Pusat yang diketuai Oyong, dikutip dari putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, diakses dari Jakarta, Kamis (2/3).

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam putusannya, yakni untuk memulihkan serta terciptanya keadaan yang adil, serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan oleh tergugat, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Majelis hakim memerintahkan kepada KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024.

Selain itu, majelis hakim juga menyatakan bahwa fakta-fakta hukum telah membuktikan terjadi kondisi *error* pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang disebabkan faktor kualitas alat yang digunakan atau faktor di luar prasarana. Hal tersebut, tutur hakim, terjadi saat Partai Prima mengalami kesulitan dalam menyampaikan perbaikan data peserta partai politik ke dalam Sipol yang mengalami *error* pada sistem. Tanpa adanya toleransi atas apa yang terjadi tersebut, akhirnya KPU menetapkan status Partai Prima tidak memenuhi syarat (TMS).

* **Bersam bung hal 7 kol 5**

Analisis KR
Berpikir Bebas

Dr Aprinus Salam

KUALITAS demokrasi dan HAM dapat dilihat dari bagaimana warga/rakyat mendapatkan kesempatan yang luas untuk berpikir bebas (kebebasan berpikir). Tindakan berpikir bebas tentu tidak dapat dengan mudah diketahui. Hal berpikir bebas dapat diketahui dari pernyataan-pernyataan (lisan atau tertulis), termasuk pilihan tindakan yang diambil seorang dalam menjalani hidupnya. Warga tidak takut disalah-salahkan jika menyatakan pendapatnya atau jika melakukan aktifitas tertentu.

Jika hal-hal di atas belum terpenuhi, maka kualitas demokrasi dan HAM masih sangat buruk. Praktik kehidupan

* **Bersambung hal 7 kol 1**

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
Jumat, 3 Maret 2023	11:54	14:56	18:01	19:11	04:27

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

TANGGAPI KASUS ANAK PEJABAT PAJAK

Presiden Sebut Rakyat Pantas Kecewa

KR-Antara/Hafidz Mubarak A

Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, rakyat pantas kecewa dengan kasus penganiayaan dan pamer harta yang dilakukan anak pejabat Ditjen Pejak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo (RAT). Presiden mengatakan dirinya mengetahui kekecewaan masyarakat atas kasus Mario Dandy, anak dari pejabat pajak Rafael serta pejabat Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Eko Darmanto yang sering pamer kekayaan di media sosial.

"Kalau seperti itu *ya* pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya, perilakunya jumawa, dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis," kata Presiden Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3).

"Dari komentar yang Presiden baca,

* **Bersambung hal 7 kol 1**

KPK DORONG SANKSI TEGAS LHKPN

Jeep Rubicon Rafael Ditelusuri

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Pusat untuk membuat perubahan regulasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), khususnya soal siapa saja yang wajib menyerahkan LHKPN dan sanksi yang lebih tegas.

"Ya, jadi kami mendorong agar ada perubahan terkait peraturan komisi yang menyangkut LHKPN. Sejauh ini kan misalnya siapa pejabat yang wajib melaporkan LHKPN, mestinya kita KPK yang mengatur," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Kamis (2/3).

Alex mengatakan, KPK mendorong perubahan regulasi tersebut lantaran ada sejumlah pejabat yang memegang posisi strategis namun tidak masuk kategori penyelenggara negara. Akibatnya pejabat tersebut tidak wajib menyerahkan LHKPN kepada KPK.

"Jadi ada beberapa pejabat yang posisinya itu strategis tapi menurut Undang Undang Pemerintahan itu kategorinya bukan penyelenggara negara, itu dia enggak lapor, padahal posisinya strategis," ujarnya.

Alex juga mendorong ada sanksi yang lebih tegas terhadap pejabat yang tidak jujur dalam mengisi LHKPN, karena selama ini tidak ada sanksi tegas terkait LHKPN. Pasalnya, selama ini apabila ditemukan LHKPN yang tidak sesuai, maka pelapor LHKPN tersebut hanya diminta untuk memperbaiki isi LHKPN-nya.

* **Bersam bung hal 7 kol 1**

KALAH 1-2 DARI PERSITA

Masalah PSS Tak Kunjung Terurai

KR-Antara/Muhammad Iqbal

Pemain PSS Sleman Kim Kurniawan (tengah) berebut bola dengan pemain Persita Tangerang Charisma Fathoni (kiri).

TANGERANG (KR) - Masalah PSS Sleman di Liga 1 2022/2023 nampaknya tak kunjung terurai. Laskar Sembada belum lepas dari rangkain hasil buruk. Pada pekan 28, Kamis (2/3), PSS dipaksa menyerah oleh Persita Tangerang dengan skor 2-1.

Bermain di Indomilk Arena, PSS tak berdaya sejak

* **Bersambung hal 7 kol 5**

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● **SAYA punya cucu laki-laki umur 6 tahun bernama Satria. Ia memelihara kucing bernama Boba yang setiap pagi menemani saya duduk di teras rumah. Pada 13-16 Februari 2023 saya opname di rumah sakit. Begitu sampai di rumah, saya menanyakan Boba di mana. Cucu saya malah protes, "Simbah ini baru sampai rumah kok yang ditanyain Si Boba, bukan nanyain kabar aku, cucunya." (Parsidi, Jalan Nogomudo 184 RT 5 RW 2 Gowok, Caturtunggal Depok Sleman)-f**